

PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

Riska Anggraini¹, Muhamad Hafiz Rafiqi², Fellyna Septin Kusuma Dewi³, Delta Wahyu Angreini⁴, Moh. Roficon Amin⁵, Hazinda Sholehana⁶

anggrariska52@gmail.com¹, mashafiz175@gmail.com², felinsepti@gmail.com³, deltawahyuangreini@gmail.com⁴, shefiashefia128@gmail.com⁵, hasyindasholehana@gmail.com⁶

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang penyusunan kebijakan publik. Kebijakan adalah sebuah hal yang digunakan dalam menunjukkan sebuah perilaku seseorang.ber tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dialami. Dalam permasalahan proses kebijakan publik tiap tahapannya mempunyai kegiatan yang kompleks dan melibatkan pihak-pihak yang dengan sesuai kepentingan masing-masing. Kebijakan publik mengacu pada hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari tindakan pemerintah, Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik baru diketahui setelah kebijakan publik dilaksanakan. Faktor dari kebijakan publik adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan mengenai tindakan politik seperti tindakan yang diinginkan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Dalam penulisan ini menggunakan metodologi study kepustakaan, untuk menulis artikel ini database google scholar digunakan untuk mengkaji 16 artikel yang berkaitan dengan kebijakan publik dan konsep pembuatan kebijakan. Hasilnya dijadikan karya ilmiah. Proses penyusunan kebijakan adalah sebuah perjalanan kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, pemangku kepentingan, dan pertimbangan. Dari identifikasi masalah hingga pengesahan kebijakan, setiap langkah memerlukan analisis mendalam, keterlibatan luas pihak terkait, serta ketelitian dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah penyusunan kebijakan secara cermat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik, Pemangku Kepentingan, Analisis Kebijakan

PENDAHULUAN

Kebijakan adalah sebuah hal yang digunakan dalam menunjukkan sebuah perilaku seseorang. Memiliki tujuan untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dialami. Alokasi penyusunan publik memiliki beberapa rangkaian yang disebut proses kebijakan public. kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan(Nur dan Guntur 2019). Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya. Pengertian lainnya, kebijakan publik hanya sebatas dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan, dan peraturan pemerintahan(Medtek n.d.).

Dalam permasalahan proses kebijakan publik tiap tahapannya mempunyai kegiatan yang kompleks dan melibatkan pihak-pihak yang dengan sesuai kepentingan masing-masing. Kebijakan menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya (Sunarto 2015). Tahapan dalam pembuatan kebijakan publik memiliki langkah dan metode yang berbeda-beda. Untuk membuat suatu kebijakan pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Dengan begitu masyarakat dapat memberikan saran kepada pemerintah dalam pembentukan suatu kebijakan. Pembentukan suatu kebijakan tentunya memiliki proses yang rumit, para ahli membagi proses kebijakan publik dengan tujuan untuk mempermudah. Penyusunan agenda diawali dengan permasalahan yang muncul di masyarakat. Suatu permasalahan dapat timbul dari permasalahan pribadi atau kelompok yang berkembang menjadi permasalahan publik apabila berdampak pada individu saja, sedangkan permasalahan publik berdampak pada masyarakat luas.

Kebijakan dibuat pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran (Siti Anisatun 2014). Adanya kebijakan didasarkan oleh kebutuhan untuk mencari suatu hal yang belum menemukan penyelesaiannya. Kebijakan publik ditentukan oleh pihak kelompok pementingan yang berorientasi pada pemuasan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik mengacu pada hubungan yang memungkinkan tercapainya tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari tindakan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik baru diketahui setelah kebijakan publik dilaksanakan. Faktor dari kebijakan publik adalah undang-undang, peraturan, dan keputusan mengenai tindakan politik seperti tindakan yang diinginkan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah, sesuatu yang diberikan secara menyuluruh oleh pemerintah ke masyarakat. Pengistribusian nilai pada masyarakat memiliki dampak, yaitu dampak baik maupun buruk. Umumnya kebijakan publik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang timbul dari permasalahan yang ada dengan penyelesaian masalah yang telah ditentukan.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metodologi studi kepustakaan. Untuk menulis artikel ini, database google scholar digunakan untuk mengkaji 16 artikel yang berkaitan dengan kebijakan publik dan konsep pembuatan kebijakan. Hasilnya disajikan dalam artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyusunan kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses kebijakan, artinya suatu aktivitas yang berlangsung secara stimulant, namun apabila dikaji secara mendalam dari segi teoritik maupun praktis, maka penyusunan kebijakan suatu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan (MAdani 2011). Kebijakan adalah serangkaian prinsip atau tindakan yang diusulkan atau diimplementasikan oleh pemerintah, organisasi, atau institusi untuk mencapai tujuan tertentu atau menangani masalah tertentu. Perencanaan Evaluasi & Pelaporan dan Kasubag Keuangan dari tiap-tiap OPD (Muadi, MH, dan Sofwani 2016). Kebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pengambilan keputusan dan operasi dalam berbagai konteks, baik dalam sektor publik maupun swasta. Kebijakan publik didefinisikan sebagai "tindakan pemerintah yang

dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memecahkan masalah sosial, ekonomi, atau politik”. Kebijakan ini yang dapat dijadikan referensi utama bagi warga negara maupun anggota organisasi dalam berperilaku (Kholifah et al. 2024). Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, dan lingkungan, dan biasanya dirancang melalui proses yang melibatkan penelitian, konsultasi, dan perencanaan (Dunn, W. N. (2008). Kebijakan publik, khususnya, difokuskan pada tindakan pemerintah untuk mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, atau politik. Proses penyusunan kebijakan umumnya melibatkan penelitian yang mendalam, konsultasi dengan berbagai pihak, dan perencanaan yang matang untuk memastikan efektivitas dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.

Kebijakan publik memainkan peran dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kebijakan yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan publik sangat penting:

1. Menyediakan Kerangka Hukum dan Regulasi

Kebijakan publik menetapkan kerangka hukum dan regulasi yang dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Misalnya, undang-undang yang mengatur keselamatan kerja membantu melindungi hak-hak pekerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman.

2. Mengatasi Masalah Sosial

Banyak masalah sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan gender, membutuhkan kebijakan yang dirancang dengan baik untuk diatasi. Kebijakan sosial yang efektif, seperti program bantuan sosial dan subsidi pendidikan, dapat memberikan solusi nyata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan .

3. Mendorong Pembangunan Ekonomi

Kebijakan ekonomi yang baik dapat mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas. Misalnya, kebijakan fiskal yang tepat dapat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan . Selain itu, regulasi yang mendukung inovasi dan teknologi dapat mempercepat perkembangan industri baru.

4. Melindungi Lingkungan

Isu lingkungan seperti perubahan iklim, polusi udara, dan deforestasi memerlukan kebijakan yang tegas dan terukur. Kebijakan lingkungan yang berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan konservasi sumber daya alam sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan planet kita.

5. Meningkatkan Kesejahteraan Publik

Kesehatan masyarakat dan pendidikan adalah dua bidang di mana kebijakan publik memiliki dampak besar. Program kesehatan nasional dan kebijakan pendidikan yang inklusif dapat memastikan akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Misalnya, kebijakan Universal Health Coverage (UHC) yang diterapkan di banyak negara telah berhasil meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan .

6. Menciptakan Stabilitas Politik dan Sosial

Kebijakan publik yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, sehingga menciptakan stabilitas politik dan sosial. Partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan juga penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Kebijakan publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Oleh karena

itu, proses penyusunan kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan didasarkan pada data serta penelitian yang akurat. Pembuat kebijakan publik disebut dengan stakeholder. Stake holder dalam pembuatan kebijakan publik adalah pemerintah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan azas kepentingan masyarakat(Desrinelti, Afifah, dan Gistituati 2021). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata dan solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.

A. Tahapan Penyusunan Kebijakan

1. Perumusan Masalah

Dalam proses penyusunan kebijakan harus melalui tahapan salah satunya perumusan masalah. Perumusan masalah dapat memberikan informasi yang relevan dengan kebijakan yang mempertanyakan kecurigaan yang mendasari definisi masalah dan masuk ke dalam persiapan pembuatan kebijakan melalui penyusunan rencana. Perumusan masalah dapat menawarkan bantuan untuk mengungkapkan dugaan yang ditutup-tutupi, menganalisis penyebab, menguraikan target penyebab, menguraikan tujuan-tujuan yang mungkin dicapai, mengkoordinasikan benturan-benturan yang ada, dan merencanakan celah-celah pendekatan yang tidak terpakai. Masalah harus signifikan, masalah itu harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah manusia(Susilana 2020). Perumusan masalah merupakan tahap penting dalam proses penyusunan kebijakan. Dengan perumusan masalah yang baik, kebijakan yang dihasilkan akan lebih terarah, efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mekanisme dan dinamika dari transformasi suatu kondisi dalam masyarakat menjadi suatu masalah kebijakan yang harus dicari jalan keluarnya melalui penggunaan kekuasaan pemerintahan untuk membuat kebijakan(Meutia 2017).

2. Analisis Masalah dan Kebutuhan

(Abdulah et al. 2022)Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah?

3. Penginformasian Rencana Kebijakan

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4. Perumusan Tujuan Kebijakan

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

5. Pemilihan Model Kebijakan

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metoda dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penentuan Indikator Sosial

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau

standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

7. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik

Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses pengambilan kebijakan yang menghubungkan teori dan praktik. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan (Pramono 2020). Konversi konsep dan rencana kebijakan konsep dan rencana kebijakan menjadi tindakan nyata di lapangan. Pertama dan yang terpenting, diperlukan implementasi, penciptaan strategi implementasi yang menyeluruh strategi implementasi menyeluruh yang mencakup alokasi sumber daya dan manajemen waktu yang mencakup alokasi sumber daya dan manajemen waktu. implementasi kebijakan diperlukan karena adanya masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Akib 2010). Betapa pun baiknya rumusan sebuah kebijakan publik jika gagal diimplementasikan maka kebijakan tersebut tidak ada gunanya. Implementasi kebijakan adalah salah satu sekuen determinan dalam seluruh proses kebijakan publik, karena dia langsung berhubungan dengan kinerja suatu kebijakan, terwujudnya tujuan dan hasil (output dan outcomes). Karenanya, memastikan efektivitas implementasi kebijakan publik menjadi sangat penting, yaitu pertama-tama dengan memahami dengan baik dan benar seluruh proses kebijakan publik, terlebih faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang berpengaruh yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, mudah tidaknya masalah yang akan digarap, kemampuan kebijakan menstruktur implementasi secara tepat. Kedua, mengawal implementasi kebijakan publik dengan penuh tanggungjawab melalui monitoring, evaluasi, dan pengendalian (Sutmasa 2021). Langkah langkah selanjutnya adalah memobilisasi sumber daya untuk menjamin tersedianya sumber mengerahkan yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya menjamin bahwa terdapat cukup dana untuk memungkinkan pelaksanaan kebijakan. Setelah itu, tindakan spesifik tindakan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan, baik berupa kegiatan operasional, perolehan produk dan layanan, maupun pemberian layanan masyarakat. dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan, baik dalam bentuk kegiatan operasional, perolehan produk dan layanan, maupun pemberian layanan masyarakat. metode menekankan ini perlunya pemantauan dan evaluasi.

C. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai kinerja suatu kebijakan melalui analisis data dan informasi terkait pelaksanaan dan hasil kebijakan tersebut. Evaluasi memiliki sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. (1) evaluasi memberikan informasi yang valid dan bisa dipercaya berhubungan dengan kinerja kebijakan, yaitu seberapa bermakna suatu kebutuhan, nilai dan kesempatan telah diwujudkan melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) serta target tertentu yang telah dicapai. (2) evaluasi memberikan kontribusi pada klarifikasi serta kritik terhadap nilai yang diperjelas dengan cara mendefinisikan serta mengoperasionalkan tujuan dan target (Subianto 2020). evaluasi pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan secara komprehensif, yang meliputi: evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post atas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam melakukan inovasi

dan terobosan dalam pelayanan kepada publik, dapat dilakukan diskresi pelaksanaan kebijakan publik sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku (Ramdhani dan Ramdhani 2017). Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan sistematis, pembuat kebijakan dapat terus memperbaiki kebijakan yang ada, memastikan bahwa tujuan yang diharapkan tercapai, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kesimpulan, penjelasan, kritik, modifikasi, dan pengembalian rumusan masalah semuanya termasuk dalam proses evaluasi.

KESIMPULAN

Proses penyusunan kebijakan adalah sebuah perjalanan kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, pemangku kepentingan, dan pertimbangan. Dari identifikasi masalah hingga pengesahan kebijakan, setiap langkah memerlukan analisis mendalam, keterlibatan luas pihak terkait, serta ketelitian dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Pengesahan kebijakan menjadi tonggak penting yang menandai keberhasilan dalam merumuskan keputusan yang diterima secara legal dan politik. Namun, implementasi kebijakanlah yang pada akhirnya menjadi penentu utama dalam kesuksesan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah penyusunan kebijakan secara cermat, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat atau organisasi yang dituju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Alchonity Harika Fitri, Ayu Mustika Sari, Nurhizrah Gistituati, dan Rusdinal. 2022. "Tahapan Pembuatan Kebijakan Publik Sebagai Landasan Pengambil Kebijaksanaan." *Jurnal Muara Pendidikan* 7(1): 148–55.
- Akib, Haedar. 2010. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana HAEDAR AKIB Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1): 1–11.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituati. 2021. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6(1): 83. doi:10.29210/3003906000.
- Kholifah, Eling Retno, Mulyadi Mulyadi, Suryadi Suryadi, Sutriyanti Sutriyanti, dan Hermanto Hermanto. 2024. "Model Perumusan Kebijakan Pendidikan." *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7(2): 1399–1404. doi:10.54371/jiip.v7i2.3441.
- MAdani, Muhlis. 2011. "Dimensi interaksi aktor dlm BUKU KEBIJAKAN PUBLIK." : 210. Medtek, Jurnal. "Aka N Pendidikan."
- Meutia, Intan Fitri. 2017. Analisis Kebijakan Publik Intan Fitri Meutia.
- Muadi, Sholih, Ismail MH, dan Ahmad Sofwani. 2016. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6(2): 195–224. doi:10.15642/jrp.2016.6.2.195-224.
- Nur, Andi Cudai, dan Muhammad Guntur. 2019. "Analisis Kebijakan Publik." *Analisis Kebijakan Publik* (April): 147. https://www.researchgate.net/profile/Andi-Nur/publication/350619992_ANALISIS_KEBIJAKAN_PUBLIK/links/60849bfc8ea909241e224e4a/ANALISIS-KEBIJAKAN-PUBLIK.pdf.
- Pramono, Joko. 2020. Kebijakan Publik Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.
- Ramdhani, Abdullah, dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*: 1–12. doi:10.1109/ICMENS.2005.96.
- Siti Anisatun. 2014. "Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka." *Convention Center Di Kota Tegal*: 9.
- Subianto, Agus. 2020. Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan < Implementasi dan Evaluasi.

- Sunarto. 2015. "Kebijakan Publik, Pendelegasian Tanggung Jawab Kepada Presiden." (August): 9–10.
- Susilana, Rudi. 2020. "Identifikasi Dan Perumusan Masalah." Universitas Pendidikan Indonesia 1(1): 1–7.
- Sutmasa, Yosep Gede. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." Jurnal Ilmiah Cakrawarti 4(1): 25–36. doi:10.47532/jic.v4i1.242.